

Resolusi Meratus

Salam Adil dan Lestari,

Salam Nusantara,

Pada Hari ini Rabu, Tanggal 13, Bulan Agustus, Tahun 2025 pukul 16.05 WITA, bertempat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kami Aliansi Meratus yang terdiri dari Komunitas Masyarakat Adat, Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, telah melaksanakan konsolidasi terbuka untuk menyikapi usulan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk menetapkan wilayah adat meratus sebagai Taman Nasional Pegunungan Meratus.

Kami memandang bahwa usulan penetapan taman nasional pegunungan meratus tidak hanya mengingkari keberadaan kami sebagai Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang telah mendiami pegunungan Meratus secara turun-temurun dan mempraktikkan model-model pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan tradisional dan hukum adat yang kami miliki. Tetapi juga sekaligus akan menggusur dari ruang hidup dan penghidupan kami baik sebagai peladang, petani, dan berbagai bentuk pekerjaan tradisional kami selama ini.

Berdasarkan hal tersebut, Kami Aliansi Meratus menyatakan sikap dengan tegas sebagai berikut:

1. Menolak rencana penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus di wilayah adat Masyarakat Adat Meratus di Kalimantan Selatan.
2. Mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera menarik kembali pengajuan penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan.
3. Mendesak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh proses penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan.

4. Mendesak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Mengimplementasikan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Kami Aliansi Meratus juga mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera :

1. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam masa sidang tahun 2025.
2. Melakukan revisi total Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI
3. Mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Demikian resolusi ini kami buat berdasarkan kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran. Meratus bukan tanah kosong. Tolak penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus!

Hormat Kami

Banjarbaru, 13 Agustus 2025

